LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

JALAN. VETERAN NO. 10 JAKARTA 10110 Telp. (021) 3868201-05
http:/www.lan.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR: 1000/S.1.3/SDM.01.2

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2023

Sehubungan pelaksanaan proses pengadaan Aparatur Sipil Negara tahun anggaran 2023, kami sampaikan bahwa Lembaga Administrasi Negara membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis yang akan ditugaskan di sejumlah satuan kerja Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan ketentuan pada pengumuman ini.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Kerja sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi Sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Teknis;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023;
11. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023.

B. Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Formasi, dan Unit Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023 untuk Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Formasi dan Unit Penempatan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diperuntukkan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Jenis Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Jumlah Formasi dan Unit Penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2023

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Formasi	Jenis Formasi	Unit Penempatan
1	Ahli Pertama-Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	• S-1 Psikologi, • S-1 Ilmu Sosial • S-1 Ilmu Ekonomi • S-1 Ilmu Pendidikan • S-1 Ilmu Hukum • S-1 Ilmu Manajemen	1	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara (lokasi Jakarta)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2	Ahli Pertama-Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	• S-1 Psikologi, • S-1 Ilmu Sosial • S-1 Ilmu Ekonomi • S-1 Ilmu Pendidikan • S-1 Ilmu Hukum • S-1 Ilmu Manajemen	2	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Utama, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (lokasi Jakarta)
3	Ahli Pertama-Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	• S-1 Psikologi, • S-1 Ilmu Sosial • S-1 Ilmu Ekonomi • S-1 Ilmu Pendidikan • S-1 Ilmu Hukum • S-1 Ilmu Manajemen	1	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Teknis dan Sosio Kultural (lokasi Jakarta)
4	Ahli Pertama-Analis Sumber Daya Aparatur	• D-IV Administrasi Negara, • D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik • D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur • D-IV Manajemen Informatika • S-1 Administrasi Negara • S-1 Ilmu Administrasi Negara • S-1 Administrasi Publik • S-1 Ilmu Administrasi Publik • S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik • S-1 Ilmu Informatika • S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia • S-1 Teknik Informatika dan Komputer • S-1 Teknologi Informasi	1	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Utama, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (lokasi Jakarta)
5	Ahli Pertama-Analis Sumber Daya Aparatur*	• D-IV Administrasi Negara, • D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor	1	Umum (Disabilitas)	Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Utama, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum (lokasi Jakarta)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

		Publik • D-IV Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur • D-IV Manajemen Informatika • S-1 Administrasi Negara • S-1 Ilmu Administrasi Negara • S-1 Administrasi Publik • S-1 Ilmu Administrasi Publik • S-1 Manajemen dan Kebijakan Publik • S-1 Ilmu Informatika • S-1 Manajemen Sumber Daya Manusia • S-1 Teknik Informatika dan Komputer • S-1 Teknologi Informasi			
6	Ahli Pertama-Asesor SDM Aparatur	• S-1 Psikologi	1	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (lokasi Bandung)
7	Ahli Pertama-Pranata Komputer	• S-1 Sains Data • S-1 Teknik Komputer • S-1 Informatika • S-1 Sistem Informasi • S-1 Sistem Komputer • S-1 Ilmu Komputer, • S-1 Sistem Informatika • S-1 Teknik Informatika • S-1 Teknologi Komputer • D-IV Sistem Informasi	2	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Pusat Data dan Sistem Informasi
8	Ahli Pertama-	• S-1 Sains Data	1	Umum	Lembaga Administrasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

	Pranata Komputer	• S-1 Teknik Komputer • S-1 Informatika • S-1 Sistem Informasi • S-1 Sistem Komputer • S-1 Ilmu Komputer, • S-1 Sistem Informatika • S-1 Teknik Informatika • S-1 Teknologi Komputer • D-IV Sistem Informasi			Negara, Deputi Bidang PenyelenggaraanPengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara (lokasi Jakarta)
9	Ahli Pertama-Pranata Komputer	• S-1 Sains Data • S-1 Teknik Komputer • S-1 Informatika • S-1 Sistem Informasi • S-1 Sistem Komputer • S-1 Ilmu Komputer, • S-1 Sistem Informatika • S-1 Teknik Informatika • S-1 Teknologi Komputer • D-IV Sistem Informasi	1	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Kepala Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara (lokasi Aceh)
10	Ahli Pertama-Pranata Komputer	• S-1 Sains Data • S-1 Teknik Komputer • S-1 Informatika • S-1 Sistem Informasi • S-1 Sistem Komputer • S-1 Ilmu Komputer, • S-1 Sistem Informatika • S-1 Teknik Informatika • S-1 Teknologi Komputer • D-IV Sistem Informasi	1	Umum	Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Teknis dan Sosio Kultural (lokasi Jakarta)
	TOTAL		**12**		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

C. Deskripsi Tugas Jabatan dan Rentang Penghasilan

Informasi terkait dengan tugas jabatan dan rentang penghasilan yang akan diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Lembaga Administrasi Negara adalah sebagai berikut :

Tabel 2:
Tugas Jabatan dan Rentang Penghasilan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023
Di Lembaga Administrasi Negara

No	Jabatan	Deskripsi Umum Tugas Pekerjaa	Rentang Penghasilan
1	Ahli Pertama-Analis Pengembangan Kompetensi ASN	Melaksanakan pemetaan, menginventarisasi jenis dan jalur pengembangan, mendesain dan mengembangkan kompetensi serta memonitor dan mengevaluasi pelaksanan pengembangan kompetensi ASN	Rp 7.561-500 s/d 7.561-500
2	Ahli Pertama-Analis Sumber Daya Aparatur	Mengelola Sumber Daya manusia Aparatur terkait dengan beban kerja, uraian jabatan, menyusun SOP, merumuskan Indikator Kinerja Individu serta penegakan disiplin pegawai.	Rp 8.101.650 s/d 8.101.650
3	Ahli Pertama – Analis Asesor SDM Aparatur	Melakukan kegiatan pelaksanaan pemetaan dan pengukuran kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan melalui alat tes psikometri	Rp 8.101.650 s/d 8.101.650
4	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Melakukan pengelolaan teknologi informasi,memastikan pengoperasian sistem dan infrastruktur teknologi informasi,dan menjaga sistem dalam jaringan.	Rp 8.101.650 s/d 8.101.650

D. Persyaratan Umum Pelamar PPPK

Berikut adalah persyaratan umum bagi pelamar PPPK:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Usia minimal 20 (duapuluh) tahun dan maksimal 40 (empat puluh) tahun;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Republik Indonesia, anggota Kepolisan Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit TNI atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar;
8. Bersedia ditempatkan ke seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia;
9. Memiliki kualfikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah (bukan surat keterangan LULUS) dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional-Perguruan Tinggi (BAN-PT);
    b. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan.
10. Memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan yang dilamarnya, dibuktikan dengan surat keterangan dan ditandatangani oleh:
    a. Pimpinan Tinggi Pratama/setara, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah/BUMN/BUMD; atau
    b. Pimpinan yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya masyarakat/yayasan;
11. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah;
12. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
13. Tidak bertato dan tindik bagi laki-laki kecuali yang disebabkan oleh ketentuan adat;
14. Bersedia mengabdi kepada Lembaga Administrasi Negara dengan menandatangani perjanjian kerja selama 5 (lima) tahun sejak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

ditandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan evaluasi kinerja minimal dengan predikat baik setiap tahunnya

15. Merupakan lulusan sarjana (S-1) atau lulusan Diploma Empat (D-IV) dengan persyaratan jabatan pada kebutuhan jabatan yang dilamar dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol);
16. Penyandang disabilitas dapat melamar pada kebutuhan umum PPPK tenaga teknis LAN T.A. 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pelamar dapat melamar jabatan yang diberi tanda (*) dalam huruf B tabel 1 sebagaimana tercantum pada nomor 5;
    b. Saat melamar wajib menyatakan status disabilitasnya yang dibuktikan dengan:
        1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
        2) Video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

E. Persyaratan Khusus Pelamar PPPK

Berikut adalah persyaratan khusus untuk pelamar PPPK:

1. Jabatan Ahli Pertama-Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur:
    a. Wajib memiliki minimal 4 (empat) dari 6 (enam) keahlian sebagai berikut:
        1) Menguasai analisis pemetaan kompetensi sumber daya manusia;
        2) Memiliki kemampuan menginventarisasi jenis dan jalur pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
        3) Menyusun desain pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
        4) Memiliki kemampuan pengembangan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang sudah tersedia;
        5) Memiliki kemampuan memantau pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang sudah berjalan; dan
        6) Mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang selesai dilaksanakan
    b. Melampirkan portofolio yang membuktikan 4 (empat) keahlian sebagaimana di point (a);
    c. Untuk Point (b) wajib dikirim secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Bahan tersebut akan digunakan pada saat pelaksanaan wawancara.

2. Jabatan Ahli Pertama-Analis Sumber Daya Aparatur
    a. Wajib memiliki minimal 4 (empat) dari 6 (enam) keahlian sebagai berikut:
        1) Menganalisis penghitungan beban kerja sumber daya manusia;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2) Memiliki kemampuan menyusun uraian jabatan;
3) Memiliki kemampuan menyusun Standar Operating Procedure (SOP) Manajemen Sumber Daya Manusia;
4) Menyusun perumusan Indikator Kinerja Individu (IKI) sesuai jabatan;
5) Mengelola proses tindakan disiplin pegawai; dan
6) Menangani keluhan permasalahan pegawai terkait dengan manajemen sumber daya manusia.

b. Melampirkan portofolio yang membuktikan 4 (empat) keahlian sebagaimana di point (a);

c. Untuk Point (c) wajib dikirim secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Bahan tersebut akan digunakan pada saat pelaksanaan wawancara.

3. Jabatan Ahli Pertama-Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Wajib memiliki minimal 4(empat) dari 6 (enam) keahlian sebagai berikut:
1) Memiliki pemahaman tentang konsep kompetensi dan operasionalisasi dalam pengukurannya
2) Mampu atau pernah melakukan pemetaan atau pengukuran kompetensi
3) Mampu atau pernah terlibat dalam pengelolaan proses bisnis / kegiatan penilaian kompetensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyampaian hasil penilaian
4) Memiliki pengalaman mengadministrasikan alat tes psikologi / psikometri
5) Mampu menyusun laporan hasil penilaian kompetensi (profil kompetensi)
6) Mampu menentukan pendekatan penilaian kompetensi sesuai dengan tujuan dan target penilaian kompetensi

b. Persyaratan khusus dapat dibuktikan dengan melampirkan sertifikasi Assesor Assesment Center atau yang serumpun;

c. Melampirkan portofolio yang membuktikan 4 (empat) keahlian sebagaimana di point (a);

d. Untuk Point (b) dan (c) wajib dikirim secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Bahan tersebut akan digunakan pada saat pelaksanaan wawancara.

4. Jabatan Ahli Pertama Pranata Komputer:

a. Menguasai minimal 1 (satu) Bahasa pemrograman (java/node.js/next.js/vue.js/ react.js/android/ios/php)
b. Memiliki pengalaman sebagai full-stack programmer/frontend/backend
c. Dapat menggunakan GIT Repository dalam pengerjaan proyek development
d. Menguasai database dan System Administrator

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

e. Menguasai dasar jaringan computer
f. Diutamakan memiliki portofolio pembangunan aplikasi sesuai dengan bahasa pemrograman sebagaimana point (a) diatas
g. Untuk Point (f) wajib dikirim dikirim secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Bahan tersebut akan digunakan pada saat pelaksanaan wawancara.

F. Tata Cara Pendaftaran Pelamar PPPK

Berikut adalah tata cara pendaftaran pelamar PPPK:

1. Pelamar mengunggah scan dokumen persyaratan melalui laman https://sscasn.bkn.go.id terdiri dari:
   a. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditunjukkan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta dengan wajib menggunakan meterai elektronik (e_meterai) Rp.10.000 (bukan meterai tempel) dan ditandatangani dengan pena berwarna hitam (format surat lamaran terlampir);
   b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
   c. Ijazah Asli dan Sertifikasi Akreditasi Program Studi dari BAN-PT;
   d. Transkrip Nilai Ijazah Asli;
   e. Pas Foto terbaru ukuran 4x6 menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
   f. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik dengan komputer dengan wajib menggunakan meterai elektronik (e_meterai) Rp.10.000 dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna hitam (format surat pernyatan terlampir);
   g. Surat Keterangan Memiliki Pengalaman Kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar;
   h. Sertifikat keahlian sesuai dengan jabatan yang dilamarnya sebagai bukti kelengkapan persyaratan khusus.
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung dilakukan secara *online* melalui laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Pendudukan (KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK)/Nomor Kartu Keluarga (KK).

G. Tahapan Seleksi PPPK

Tahapan seleksi PPPK meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari:
   a. Kompetensi Teknis;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

b. Kompetensi Manajerial;
c. Kompetensi Sosial Kultural; dan
d. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas).

3. Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan yang terdiri dari:
   a. Paparan atau Presentasi terkait dengan Portofolio;
   b. Wawancara.

H. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK

Jadwal seleksi pengadaan PPPK adalah sebagai berikut:

Tabel 1:
Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK

No	Kegiatan	Tanggal (*tentative)*
1	Pengumuman Seleksi https://lan.go,id	19 September s/d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi secara Online https://sscasn.bkn.go.id	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	13 – 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 – 19 Oktober 2023
6	Jawab sanggah	17 – 21 Oktober 2023
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 – 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 – 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober – 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	3 - 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi kompetensi	8 November - 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November – 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14	Pengumuman kelulusan	4 - 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
20	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

I. Sistem Kelulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

1. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada hasil verifikasi persyaratan administrasi yang diunngah melalui laman:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

https://sscasn.bkn.go.id. Adapun pengumuman kelulusan seleksi administrasi diumumkan oleh Tim Pengadaan PPPK Lembaga Administrasi Negara melalui laman: https://lan.go,id. Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib pencetak kartu ujian di laman: https://sscasn.go,id;

2. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural dan wawancara ditetapkan oleh Panselnas;
3. Nilai dari Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan maksimal 50% dari Total Nilai Seleksi kompetensi teknis yang menggunakan CAT;
4. Nilai seleksi Kompetensi Teknis Tambahan terdiri dari Paparan Portofolio dan hasil kerja sebesar 25% dan Wawancara *User* sebesar 25%;
5. Kelulusan Akhir akan ditentukan kemudian oleh Tim Panselnas.

J. Lain-Lain

1. Masa Hubungan Perjanjian Kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian Lembaga Administrasi Negara ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi dengan evaluasi kinerja minimal memperoleh kriteria baik setiap tahunnya.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil lulus seleksi administrasi apabila terjadi kesalahan verifikasi administrasi oleh panitia sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkam.
3. Panitia pengadaan PPPK akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah oleh pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
4. Lokasi tempat pelaksanaan seleksi dengan menggunakan CAT akan diumumkan melalui: https:/lan.go.id. Peserta wajib untuk membuka laman website tersebut.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Pelaksanaan jadwal, lokasi dan peserta Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan akan diumumkan secara resmi di laman Lembaga Administrasi Negara: https://lan.go,id.
7. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan pengadaan PPPK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2023 akan diumumkan secara resmi di laman Lembaga Administrasi Negara: https://lan.go,id.
8. Pelamar wajib untuk dapat mengakses laman diatas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi pengadaan PPPK LAN tahun anggaran 2023.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

9. Tim Panita Pengadaan intansi tidak bertanggungjawab apabila pelamar tidak menerima informasi dikarenakan lalai mengakses informasi yang terdapat di laman https://lan.go.id tentang informasi pengadaan PPPK LAN tahun anggaran 2023.
10. Apabila terdapat peserta yang dinyatakan lulus dan dterima menjadi PPPK, kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Tim Panitia Pengadaan dapat menggantikan dengan peserta yang meiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Peserta yang mengundurkan diri mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi PPPK periode berikutnya.
11. Pelamar dihimbau untuk tidak mempercayai apabila terdapat orang / pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain
12. Kelulusan pelamar adalah prestasi tersendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan, Kepada pelamar, keluarganya, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK Lembaga Administrasi Negara. Apabila diketahui akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan pelamar akan digugurkan kelulusannya.
13. Apabila dalam pelaksanaan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir ditemukan terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan dapat menggugurkan status PPPK yang bersangkutan
14. Pendaftaran dan seluruh tahap seleksi tidak dipungut biaya/gratis
15. Keputusan Tim Pengadaan PPPK Lembaga Administrasi Negara tahun anggaran 2023 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
16. Pengaduan, pelayanan dan penjelasan informasi terkait dengan pengadaan PPPK Lembaga Administrasi Negara tahun anggaran 2023 dapat menghubungi *Helpdesk* Telp: 021-3455024/021-3455021 ext.203 hanya aktif melayani hari kerja Senin-Jumat jam 08.00 -16.00 WIB.

Jakarta, 25 September 2023
Ketua Tim Pengadaan PPPK LAN,

M. Yusuf Gunawan Idris

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SURAT LAMARAN PPPK

(kota), (tanggal) (bulan) 2023

YTH.
KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
DI
JAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Nomor KTP	:
Pendidikan	:
Jabatan yang dilamar	:
Unit kerja yang dilamar	:
Alamat domisili saat ini	:
Alamat sesuai KTP	:
Nomor HP	:
Alamat email	:

dengan ini menyampaikan surat lamaran agar dapat mengikuti Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di lingkungan Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2023.

Sebagai bahan pertimbangan, saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Scan* Surat Lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, ber meterai elektronik (e_meterai) Rp10.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam;
2. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
3. *Scan* Ijazah Asli dan Sertifikat Akreditasi Program Studi dari BAN-PT;
4. *Scan* Transkrip Nilai Ijazah Asli;
5. *Scan* Surat Keterangan Pengalaman Kerja paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar yang ditandatangani oleh:
    a. Pimpinan Tinggi Pratama/setara, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada instansi pemerintah/BUMN/BUMD; atau
    b. Pimpinan yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya masyarakat/yayasan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

6. Pas foto ukuran 4x6 menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
7. Scan Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, dengan wajib menggunakan meterai elektronik (e_meterai) Rp10.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
8. Scan Portofolio terkait substansi formasi yang dilamar melalui melalui laman https://sscasn.bkn.go.id.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia untuk membatalkan keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lembaga Administrasi Negara Tahun Anggaran 2023. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(kota), (tanggal) (*bulan*) 2023
Yang membuat pernyataan,

E_Meterai
Rp.
10.000,-

(Nama Lengkap)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

SURAT PERNYATAAN DATA DIRI PELAMAR PPPK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:
Tempat, tanggal lahir	:
Nomor KTP	:
Pendidikan	:
Jabatan yang dilamar	:
Unit kerja yang dilamar	:
Alamat domisili saat ini	:
Alamat sesuai KTP	:
Nomor HP	:
Alamat email	:

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
6. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
8. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.

(kota), (tanggal) (bulan) 2023
Yang membuat pernyataan,

E_Meterai
Rp10.000

(Nama Lengkap)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN